

ADVOKASI LSM SOSIAL MEDIA SOCIAL MOVEMENT INSTITUE TERHADAP HEGEMONI PEMERINTAH DALAM SENSOR MEDIA DAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DI RUANG DIGITAL

Dio Alfianto Esha Mahendra¹, Hanantyo Sri Nugroho²

Universitas Amikom Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia^{1,2}

E-mail: dioalfian11@students.amikom.ac.id¹, hanantyo@amikom.ac.id²

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah membawa keterbukaan interaksi masyarakat sehingga masyarakat mampu memperoleh berbagai informasi secara mudah dan cepat, tetapi perkembangan ini juga memunculkan ancaman khususnya berkaitan dengan persebaran informasi di media sosial. Untuk melindungi masyarakat dari ancaman tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan terkait Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat, yang memberi akses bagi pemerintah untuk melakukan take down konten yang melanggar peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk sensor media yang dilakukan pemerintah dan hubungan kebijakan tersebut dengan upaya hegemoni pemerintah. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi sejauh mana advokasi Social Movement Institute dalam melawan hegemoni pemerintah serta dampak dari upaya hegemoni terhadap kebebasan berpendapat di ruang digital. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui wawancara semi-struktural dan observasi non-partisipatif terhadap anggota Social Movement Institute. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah menggunakan akses sensor konten untuk membatasi informasi yang berlawanan dengan kepentingan mereka, sehingga menciptakan hegemoni ideologi. Akses dalam membatasi konten menunjukkan bahwa pemerintah secara sadar berupaya untuk mewujudkan dan mengendalikan informasi yang diterima oleh masyarakat. Di sisi lain, Social Movement Institute berperan sebagai kelompok anti-hegemoni yang melawan pembatasan tersebut, meskipun mereka menghadapi tekanan dari pihak buzzer.

Kata Kunci: *Hegemoni, Media Sosial, Sensor Konten, Kebebasan Berpendapat*

ABSTRACT

The development of digital technology has brought about openness in societal interactions, allowing people to access various information easily and quickly. However, this development has also raised threats, particularly related to the spread of information on social media. To protect society from these threats, the Indonesian government issued a policy regarding the Organization of Electronic Systems in the Private Sector, which grants the government access to take down content that violates laws and regulations. Therefore, this research aims to analyze the forms of media censorship carried out by the government and the relationship

between this policy and the government's hegemonic efforts. Additionally, this research explores the extent of advocacy by the Social Movement Institute in opposing the government's hegemony and the impact of hegemonic efforts on freedom of expression in the digital space. The research method used is qualitative with a case study approach, utilizing semi-structured interviews and non-participatory observation of Social Movement Institute members. The research findings indicate that the government uses content censorship access to limit information contrary to their interests, thereby creating ideological hegemony. The access to limit content shows that the government consciously seeks to shape and control the information received by society. On the other hand, the Social Movement Institute plays a role as an anti-hegemony group that opposes these restrictions, even though they face pressure from buzzer parties.

Keywords: *Hegemony, Social Media, Content Censorship, Freedom of Speech*

PENDAHULUAN

Digitalisasi menjadi pemantik perubahan dalam kehidupan manusia di berbagai lini kehidupan baik dalam sektor industri, ekonomi hingga persoalan politik dan komunikasi. Perkembangan teknologi digital telah merubah cara serta bagaimana manusia mengkomunikasikan pesan, ide serta gagasannya sehingga komunikasi digital telah mengembangkan konektivitas dan percepatan pertukaran informasi di kalangan global (Andzani, 2023).

Konteks perkembangan teknologi digital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya dalam konteks pemerintahan telah membawa masyarakat dalam tingkat partisipasi politik yang jauh lebih baik dalam mengawasi dan mengawal jalannya pemerintah, tetapi teknologi digital juga telah membatasi persepsi maupun pandangan masyarakat lewat penyesuaian algoritma big data dari riwayat digital masyarakat sehingga

informasi yang diperoleh masyarakat pada akhirnya cenderung terbatas akibat penyesuaian riwayat digital yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri (Nofiard, 2022).

Perkembangan teknologi digital memungkinkan pemerintah untuk mewujudkan hegemoninya terhadap masyarakat melalui hegemoni media yang artinya media menjadi kelompok superstruktur yang memungkinkan supremasi pemerintah dengan cara mengontrol konten maupun informasi di media digital, hegemoni pemerintah melalui media digital juga muncul dengan adanya produk hukum yang memungkinkan pemerintah dalam pengawasan ruang digital seperti media sosial sehingga dapat ikut menentukan konten yang dianggap layak ataupun tidak layak untuk ditampilkan kepada khalayak umum (Oktavianti, 2016).

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen dalam menjaga

kerahasiaan data pribadi maupun hak-hak privasi individu yang ada di Indonesia hal ini ditunjukkan dengan munculnya berbagai peraturan undang-undang dan peraturan pemerintah dengan fokus perlindungan data pribadi dan hak-hak privasi individu itu sendiri, tetapi demikian pemerintah Indonesia masih dalam tahap pengembangan yang artinya masih memerlukan banyak sekali perbaikan-perbaikan dan peningkatan dalam menjadi keamanan dan privasi individu. Studi ini juga mengungkapkan masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia di dalam instansi penegakan peraturan pemerintah dan pengawasan membuat jaminan perlindungan data serta hak-hak privasi individu di Indonesia masih belum sepenuhnya aman dan terlindungi (Judijanto et al., 2024).

Munculnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah Indonesia dalam menjamin keamanan serta penghormatan terhadap privasi individu yang ada di Indonesia disebabkan oleh pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu dan permasalahan keamanan data yang dikelola oleh pemerintah seringkali mengalami kebocoran seperti kasus pada tahun 2021 yang mana data masyarakat Indonesia yang berjumlah 279 juta diduga mengalami kebocoran dan data tersebut merupakan data milik BPJS

Kesehatan yang dikelola oleh pemerintah Indonesia sendiri (Mirnayanti et al., 2023). Maka dari itu persoalan keamanan data dan privasi individu di Indonesia hingga saat ini menjadi permasalahan yang memunculkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menjamin keamanan serta privasi data tiap-tiap individu masyarakat Indonesia.

Media memiliki peran sangat vital dalam mewujudkan hegemoni penguasa atau elit-elit di sektor ekonomi dan politik. Hegemoni bertujuan untuk mempertahankan dominasi kekuasaan oleh kelompok tertentu. Pada paradigma Antonio Gramsci menyebutkan bahwa mewujudkan hegemoni menekankan jalan tanpa kekerasan sehingga gagasan maupun ide yang telah di ditekankan oleh kelompok dominan dapat diterima sebagai sebuah kenormalan atau kewajaran (Bakri, 2022). Maka dari itu media memiliki posisi paling ideal untuk dimanfaatkan oleh elit-elit tertentu dalam melanggengkan kekuasaan maupun dominasinya melalui eksploitasi media serta pengaturan informasi demi kepentingan kelompok tertentu.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut akhirnya peneliti tertarik untuk melakukan studi dan penelitian dengan judul “Advokasi LSM Sosial Media Social Movement Institute Terhadap Hegemoni

Pemerintah Dalam Sensor Media dan Kebebasan Berpendapat di Ruang Digital” dengan menggunakan pendekatan teori hegemoni Antonio Gramsci, alasan peneliti menggunakan teori hegemoni adalah untuk memperoleh hasil analisis yang mendalam serta sistematis terhadap hegemoni pemerintah dalam sensor media.

KAJIAN PUSTAKA

Hegemoni

Hegemoni merupakan suatu konsep yang secara umum menjelaskan tentang bagaimana seseorang atau suatu kelompok berupaya mempengaruhi individu maupun kelompok lainnya. Maka dari itu menurut Wahyuddin Bakri Hegemoni merupakan suatu upaya dominasi yang dilakukan oleh suatu kelompok terhadap kelompok lainnya melalui proses tanpa kekerasan, sehingga konsep maupun ajaran yang didiktekan oleh kelompok dominan dapat diterima dan sebagai suatu kenormalan (Bakri, 2022). Sedangkan prespektif Jhon Angew (2005) menunjukkan ketidaksepakatannya terhadap konsep hegemoni konvensional yang hanya berfokus pada dominasi suatu kelompok terhadap kelompok lain, menurutnya hegemoni lebih dari sekedar dominasi sederhana apabila hegemoni hanya dilihat sebagai identitas kelompok ataupun negara yang memiliki dominasi tanpa

berupaya menyelidiki identitas tersebut serta bagaimana hal tersebut memberikan pengaruh terhadap hubungan antar kelompok di dalam hegemoni itu (Angew, 2005).

Sensor Media

Sensor media merujuk pada bagaimana konten-konten tertentu yang ada di ruang digital seperti platform media sosial kemudian di larang untuk tayang atau terjadi pembatasan konten yang dianggap tidak sesuai atau melanggar panduan pemerintah maupun platform media sosial itu sendiri dalam pandangan Evgeny Morozov (2011) menjelaskan bahwa sensor media di dunia digital tidak selalu dilakukan dengan cara pemblokiran secara langsung tetapi melalui kontrol dan memanipulasi informasi melalui pengawasan dan mengendalikan wacana sehingga pemerintah dapat mengalihkan perhatian masyarakat dari isu maupun persoalan tertentu. Maka dari itu paradigma Evgeny Morozov menekankan pada sensor media yang dilakukan secara halus, terstruktur dan sistematis sehingga seringkali publik tidak mengetahui sedang dimanipulasi maupun sedang dikontrol (Morozov, 2011). Maka dari itu Brandon Garrett (2001) menyebutkan bahwa konsep *right to be alone* tidak sepenuhnya salah tetapi konsep tersebut membawa konsekuensi bahwa manusia tidak mau ditinggal sendirian karena menurut Brandon Garret apabila tidak ada yang mengawasi maka tidak akan ada yang melindungi juga sehingga pemerintah dalam hal ini mengawasi warga negara untuk melindungi warga negaranya itu sendiri (Garret,

2001). Maka dari itu diperlukan batasan terhadap pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga tidak terjadi penyelewengan dalam pengawasan warga negara oleh pemerintah

Hegemoni Antonio Gramsci

Hegemoni menurut Gramsci merupakan upaya dominasi dari kelas penguasa yang tidak hanya terjadi melalui kontrol fisik, tetapi juga melalui penyebaran ideologi yang diterima oleh seluruh masyarakat sebagai norma. Ini berarti kelas dominan (pemerintah atau kelompok penguasa) tidak hanya menguasai alat-alat produksi atau kekuasaan politik, tetapi juga membentuk cara berpikir dan nilai-nilai yang diterima secara luas oleh masyarakat. Gramsci menekankan bahwa kekuasaan tidak hanya bersifat materi (ekonomi dan politik), tetapi juga ideologis. Kelas penguasa memanfaatkan lembaga-lembaga budaya, seperti pendidikan, media, agama, dan seni, untuk membentuk dan mempertahankan ideologi mereka, sehingga masyarakat secara sukarela menerima struktur kekuasaan yang ada (Gramsci, 2013)

Lebih lanjut, Antonio Gramsci memiliki dua pandangan terhadap konsep hegemoni itu sendiri yaitu yang pertama hegemoni dalam artian dominasi yang berkaitan dengan kuasa negara dan masyarakat sipil artinya dalam pandangan pertama Gramsci terhadap konsep Hegemoni adalah tentang dominasi

kekuasaan negara terhadap masyarakat sipil yang tidak berdaya. Sedangkan dalam pandangannya yang kedua berkaitan dengan hegemoni yang artinya sedikit berbeda, hegemoni menurut Gramsci berkaitan dengan istilah yang muncul sebagai lawan korporat-ekonomi untuk menunjukkan fase historis dimana kelompok-kelompok nonhegemonik yaitu kelompok subordinat dan subaltern. Maka dari itu prespektif Gramsci tidak ditekankan pada prespektif Marxis secara spesifik tetapi pandangannya lebih banyak digunakan sebagai patokan kritik kultural dari kelompok sosial yang mengalami hegemoni, terdominasi atau tertindas (Turner, 2012).

Alasan peneliti menggunakan teori Hegemoni Antonio Gramsci adalah peneliti melihat bagaimana kelompok penguasa dalam hal ini adalah pemerintah berupaya mewujudkan dominasinya terhadap kelompok Masyarakat melalui control ideologi dan narasi politik yang digunakan oleh pemerintah dalam berbagai siaran media sekaligus menekan kelompok perlawanan atau kelompok subordinat dengan membatasi narasi-narasi yang berlawanan dengan pemerintah, dengan menggunakan teori Gramsci, peneliti dapat mengkaji bagaimana Social Movement Institute memanfaatkan media sosial untuk menantang

ideologi dominan pemerintah, serta bagaimana mereka membangun kontra-hegemoni. Teori ini membantu peneliti untuk tidak hanya melihat kekuasaan dalam bentuk politik atau fisik, tetapi juga memahami bagaimana perjuangan ideologis dapat dilakukan melalui media sosial, yang sangat relevan dengan konteks penelitian yang sedang peneliti lakukan.

METODE

Penelitian ini berupaya mengkaji bentuk sensor media dan advokasi yang dilakukan oleh Social Movement Institute setelah diterapkannya Perkominfo nomor 5 tahun 2020 tentang PSE Lingkup Privat, Adapun Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, metode ini digunakan untuk membantu peneliti dalam menghasilkan penelitian yang mendalam dan mampu menjawab pertanyaan penelitian yang telah diajukan sebelumnya (Wada et al., 2024). Lebih lanjut penelitian kualitatif secara sederhana dapat dimaknai sebagai suatu metode penelitian yang dilakukan melalui eksplorasi mendalam serta memunculkan interpretasi terhadap fenomena yang sedang diteliti (Creswell, 2016).

Adapun Teknik pengumpulan datanya adalah menggunakan hasil wawancara yang dilakukan dengan

cara wawancara semi struktural terhadap anggota Social Movement Institute guna memperoleh hasil wawancara yang lebih mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Selain itu, dalam penelitian ini peneliti akan melakukan observasi yang dilakukan dengan Teknik observasi non-partisipatif yaitu peneliti memfokuskan observasi pada interaksi media sosial yang dimiliki oleh Social Movement Institute guna melihat fenomena secara intensif tentang hegemoni pemerintah dalam sensor media pada berbagai platform sosial media khususnya terhadap Social Movement Institute.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan sensor media di ruang digital dalam menciptakan hegemoni pemerintah

Media sosial telah berkembang menjadi sebuah platform yang tidak hanya ditujukan untuk membagikan kehidupan sosial kepada khalayak umum tetapi juga menjadi sebuah ruang bagi kelompok masyarakat untuk menyuarakan gagasan serta pendapatnya sebagai bentuk kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh undang-undang.

Perkembangan media sosial yang begitu pesat telah mendorong pemerintah untuk menyusun kebijakan guna mengawasi perkembangan media sosial yang dianggap telah terlalu bebas melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan

Informatika (Perkominfo) No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat. Pemerintah melalui regulasi ini mewajibkan PSE, termasuk media sosial dan platform digital, untuk memberikan akses kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan dan penghapusan konten tertentu yang dianggap melanggar undang-undang. Aturan ini bertujuan untuk menciptakan ruang digital yang aman, tetapi di sisi lain, memunculkan kekhawatiran mengenai potensi kontrol berlebihan terhadap kebebasan berpendapat. (Wiryawan, 2023).

Pemerintah melalui Perkominfo No 5 tahun 2020 memiliki kewenangan untuk mengawasi sekaligus mengirimkan permintaan *takedown* konten yang dianggap melanggar, hal tersebut sebagaimana tercantum dalam pasal 13 ayat 1 Perkominfo No 5 tahun 2020 tentang PSE Lingkup Privat menjelaskan sebagai berikut :

“PSE Lingkup Privat wajib melakukan Pemutusan Akses (take down) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4)”

Berdasarkan pasal 13 ayat 1 Perkominfo No 5 tahun 2020 tentang PSE Lingkup Privat menjukan bahwa pemutusan akses atau *take down*

terhadap sebuah konten di platform digital sangat mungkin dilakukan bahkan permohonan tersebut tidak hanya terbatas pada sebuah dinas atau lembaga pemerintah tertentu tetapi juga dapat dilakukan oleh masyarakat, Kementerian atau lembaga, aparat penegak hukum dan lembaga peradilan sebagaimana tertuang dalam pasal 14 ayat 1.

Adapun konten atau informasi yang dianggap dilarang sebagaimana tercantum dalam pasal 9 ayat 4 Perkominfo No 5 Tahun 2020 tentang PSE Lingkup Privat sebagai berikut :

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan klasifikasi: a. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; b. meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum; dan c. memberitahukan cara atau menyediakan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang.”

Bagi PSE Lingkup Privat yang nantinya telah mendapatkan permintaan *take down* konten tetapi tidak dilaksanakan akan mendapatkan sanksi sebagaimana tercantum pada ayat 16 ayat 8 yaitu :

“Dalam hal PSE Lingkup Privat tidak melaksanakan Pemutusan Akses (take down)

terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Menteri melakukan Pemutusan Akses dan/atau memerintahkan ISP untuk melakukan Pemutusan Akses terhadap Sistem Elektroniknya (access blocking).”

Melalui peraturan ini pemerintah memiliki kemampuan menekan PSE Lingkup Privat untuk menuruti permintaan dalam melakukan *take down* konten apabila ingin tetap beroperasi di Indonesia.

Kebijakan Sensor media dapat dilihat sebagai upaya pemerintah membangun dominasi ideologis melalui konsensus, bukan hanya melalui paksaan langsung. Melalui kebijakan seperti Perkominfo No. 5 Tahun 2020, pemerintah memiliki alat untuk mengontrol informasi yang beredar di ruang digital, sehingga narasi tertentu dapat dimanipulasi atau dimonopoli. Hal ini menunjukkan bahwa sensor media bukan hanya tentang menghapus konten, tetapi juga menciptakan wacana yang sesuai dengan kepentingan pemerintah.

Munculnya kasus terkait dengan kemampuan pemerintah dalam menekan platform-platform media sosial untuk melakukan takedown konten yang dianggap melanggar kebijakan pemerintah

membuat kebebasan berekspresi semakin terbatas ditengah tekanan publik terhadap semakin merosotnya kebebasan berekspresi di ruang publik Indonesia (Banimal et al., 2023)



Gambar 1 Permintaan Take Down Konten oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika di Akun X

Sumber : Safenet (2024)

Gambar 1 menunjukkan adanya permintaan take down konten yang ditujukan kepada platform X yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika karena dianggap melanggar hukum di Indonesia. Menurut laporan yang dikeluarkan oleh SAFENet (Southeast Asian Freedom of Expression Net) perkominfo No. 5 Tahun 2020 memiliki potensi untuk terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dan hak kebebasan berekspresi (Voice, 2021)

Laporan lebih lanjut dari SAFENet menunjukkan adanya pasal-pasal yang ambigu dan terkesan

Social Movement Institute, 23
Januari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam hal ini mengawasi konten media sosial menjadi berlebihan karena dapat mematikan pemikiran kritis masyarakat. Lebih lanjut menurut anggota Social Movement Institute juga menyebutkan tentang kebijakan perkominfo no 5 tahun 2020 yang dianggapnya sebagai kebijakan yang tidak memiliki urgensi dirinya menyebutkan :

“Sebenarnya jika (kebijakan ini) diurutkan dari tugas primer, sekunder atau tersier ini kan sebenarnya hal yang sekunder atau bahkan tersier, tugas primer pemerintah yang menjadi tanggungjawabnya aja tidak beres sekarang sudah mau kayak gini (sensor-sensor)” (Wawancara kepada anggota Social Movement Institute, 23 Januari 2025)

Pemaparan wawancara di atas menunjukkan kebijakan PSE Lingkup Privat yang cenderung tidak memiliki urgensi yang jelas karena masih banyaknya persoalan yang dianggap lebih penting (primer) untuk diselesaikan dibandingkan berfokus pada upaya sensor di platform digital.

Hegemoni dalam paradigma Antonio Gramsci menekankan pada upaya-upaya tanpa kekerasan, maka dari itu hegemoni dapat terbentuk dari upaya pemerintah dalam membangun

ideologi yang dikehendaki melalui berbagai institusi seperti agama, budaya dan media hal ini dilakukan agar informasi maupun ideologi yang disampaikan dapat diterima sebagai kebenaran umum (Gramsci, 2013).

Kebijakan sensor media di platform digital menjadi ancaman kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh undang-undang, ketidakjelasan substansi pada pasal-pasal yang tercantum dalam Perkominfo Nomor 5 tahun 2020 tentang PSE Lingkup Privat menunjukkan upaya pemerintah dalam membangun hegemoni melalui pengawasan serta kontrol media yang berlebihan.

Kebijakan yang terkesan melindungi masyarakat pada akhirnya mampu mengancam kebebasan berpendapat sebagaimana disampaikan oleh anggota Social Movement Institute yang menyampaikan :

“sebagai negara demokrasi sebenarnya ga perlu-perlu amat tapi kan tetap ada norma-norma masyarakat seperti kekerasan, pornografi dan judi online mungkin perlu tapi berkaitan dengan kebebasan berpendapat dan konten edukatif itu tidak perlu jadi selama masih dalam Batasan dan koridor tidak masalah tapi tidak terlalu perlu” (Wawancara Kepada

anggota Social Movement Institute, 23 Januari 2025)

Praktik sensor sering kali dibenarkan dengan alasan menjaga keamanan nasional, mencegah penyebaran berita bohong, atau melindungi moral publik. Narasi ini pada akhirnya akan diinternalisasi oleh masyarakat sebagai bentuk tindakan bertanggungjawab pemerintah untuk kebaikan bersama. Akibatnya, sebagian besar masyarakat tidak hanya menerima sensor, tetapi juga mendukungnya sebagai sesuatu yang wajar dan diperlukan. Dalam pandangan Gramsci, ini merupakan bentuk *consent* karena masyarakat secara sukarela mendukung struktur kekuasaan yang ada tanpa menyadari bahwa hal tersebut mengurangi kebebasan mereka.

Peran Social Movement Institute dalam Melakukan Advokasi Terhadap Sensor Konten Ruang Digital

Social movement Institute menjadi salah satu organisasi yang cukup lantang dalam menyuarakan kebebasan berpendapat dan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan kepentingan masyarakat umum. Social Movement Institute sangat *aware* terhadap ancaman dari munculnya kebijakan Perkominfo No 5 tahun 2020 tentang PSE Lingkup privat meskipun dalam perjalannya Social Movement Institute belum mengalami sensor konten secara

langsung sebagaimana disampaikan oleh anggota SMI yang menyebutkan :

“SMI sebenarnya aware tentang kebijakan PSE Lingkup privat, kebijakan tersebut rawan untuk disalahgunakan untuk menyerang masyarakat sipil sampai saat ini belum pernah ada permintaan untuk takedown atau menghapus konten, paling kena violence guidance dari instagramnya, kalau dari twitter kayak ada guidance yang tidak boleh”
(Wawancara kepada anggota Social Movement Institute, 23 Januari 2025)

Wawancara di atas menunjukan Social Movement Institute yang sampai saat ini belum terdampak dari kebijakan tentang sensor konten tetapi Social Movement Institute tetap *aware* terhadap kebijakan tersebut dan banyak melihat terjadinya kasus-kasus sensor konten yang tidak tepat sasaran sebagaimana disampaikan oleh anggota Social Movement Institute yang menyebutkan :

“SMI sendiri kalau ancaman untuk takedown tidak ada, cuman teman-teman yang berkecimpung di dunia aktivis ada yang pernah kena”
(Wawancara kepada anggota Social Movement Institute, 23 Januari 2025)

Media Sosial Sebagai Media Advokasi Publik

Media sosial muncul sebagai ruang alternatif baru dari kelompok-kelompok yang merasa tidak didengarkan oleh pemerintah untuk membuat berbagai konten edukatif untuk mencerdaskan serta meningkatkan kepekaan khalayak publik terhadap fenomena yang terjadi, abainya pemerintah terhadap upaya dialog dan diskusi yang dilakukan oleh Social Movement Institute terkait isu-isu kebebasan berpendapat di ruang digital disampaikan oleh anggota Social Movement Institute yang menyebutkan :

“belum ada sama sekali upaya pemerintah dalam mensosialisasikan atau berdiskusi dengan kami terkait kebijakan PSE lingkup Privat ini” (Wawancara Kepada anggota Social Movement Institute, 23 Januari 2025)

Senada dengan pendapat diatas, Social Movement Institute juga menyanggah sikap pemerintah yang terkesan menutup diri terhadap tuntutan publik, Social Movement Institute menyatakan :

“pemerintah cenderung tidak menanggapi keresahan kami dan masyarakat terhadap ancaman kebebasan berpendapat di ruang digital khususnya, tidak ada upaya

pemerintah untuk berdialog” (Wawancara Kepada Anggota Social Movement Institute, 23 Januari 2025)

Hasil wawancara di atas menunjukkan kecenderungan pemerintah dalam menutup diri terhadap keterbukaan informasi dan dialog dengan masyarakat umum terkait isu-isu kebebasan berpendapat di ruang digital, upaya-upaya yang dilakukan oleh Social Movement Institute seperti aksi dan konten edukatif seringkali diabaikan dan tidak mendapat tanggapan yang cukup dari pemerintah.

Bentuk advokasi yang dilakukan oleh Social Movement Institute adalah advokasi digital dengan menyampaikan berbagai isu-isu kebebasan berpendapat sehingga meningkatkan kepekaan masyarakat umum dan melawan narasi yang dibuat oleh pemerintah sebagaimana disampaikan oleh anggota SMI yang menyatakan :

“SMI pasti merespon berbagai isu seperti isu UU ITE dan kebebasan berpendapat melalui konten infografis atau propaganda-propaganda, SMI melakukan upaya seperti itu agar efektif sampai ke audiens” (Wawancara kepada anggota Social Movement Institute, 23 Januari 2025)

Persoalan serupa juga dirasakan oleh anggota Social Movement Institute lainnya yang menekankan peran aktif Social Movement Institute di media sosial sebagai bentuk advokasi digital

“SMI sangat aktif di media sosial dengan memposting berbagai isu, secara ga langsung kita kayak menyuarakan ayo lah kita bisa menggunakan media sosial sebagai arena bertarung dengan pemerintah atau penyeimbang kekuasaan itu kan salah satu bentuk advokasi kami kepada publik,” (Wawancara kepada anggota Social Movement Institute, 23 Januari 2025)



Gambar 3 Konten Edukatif Sebagai Advokasi Digital

Sumber : (Institute, 2024)

Gambar 3 menunjukkan bentuk advokasi digital yang dilakukan oleh Social Movement Institute sebagai bentuk kritik dan edukasi guna meningkatkan kepekaan masyarakat

publik terhadap isu yang sedang terjadi.



Gambar 4 Kegiatan Dialog Publik yang Diadakan Social Movement Institute

Sumber : (Institute, 2024)

Gambar 4 menunjukkan selain menggunakan media sosial sebagai sarana advokasi Social Movement Institute secara aktif mengadakan kegiatan diskusi publik dalam menyerap aspirasi masyarakat umum.

Selain menggunakan konten media sosial sebagai sarana advokasi kebijakan pemerintah, Social Movement Institute secara aktif melakukan kolaborasi dan Kerjasama dengan berbagai lembaga-lembaga lainnya seperti lembaga riset untuk menghasilkan sebuah studi yang nantinya akan disampaikan kepada masyarakat umum sebagaimana disampaikan oleh anggota Social Movement Institute yang menyebutkan :

“CELIOS (Center of Economy and Law Studies) mengajak kami kolaborasi, bagaimana nantinya SMI dapat

mengubah hasil riset menjadi lebih mudah dipahami oleh berbagai kalangan seperti menggunakan Bahasa populer” (Wawancara kepada anggota Social Movement Institute, 23 Januari 2025)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa upaya advokasi yang dilakukan oleh Social Movement Institute adalah dengan melakukan advokasi digital dan diskusi publik karena dianggap jauh lebih efektif dibandingkan harus berdialog secara langsung dengan pemerintah karena seringkali pemerintah mengabaikan upaya-upaya dialog yang dilakukan oleh Social Movement Institute.

Dampak hegemoni pemerintah melalui sensor media terhadap kebebasan berpendapat di ruang digital

Pemanfaatan media sebagai salah satu alat mencapai hegemoni dapat dilakukan dengan cara memanipulasi informasi, *framing* berita hingga pemusatan informasi tertentu kepada masyarakat umum hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Noam Chomsky (1997) sensor media merupakan suatu konsep yang ditujukan dalam menjelaskan bagaimana media digunakan oleh segelintir elit-elit politik dan ekonomi guna mengontrol opini publik. Meskipun bertujuan untuk mengontrol opini publik, menurutnya sensor media dapat dilakukan secara eksplisit dan tidak langsung seperti

pengaturan agenda, framing berita dan pembatasan informasi yang dapat dilihat oleh publik (Chomsky, 1997).

Praktik-praktik sensor media yang disebut sebagai upaya pengamanan dan perlindungan masyarakat umum oleh pemerintah cenderung pada akhirnya memberikan dampak negatif kepada masyarakat seperti pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat hingga tekanan yang dialami oleh para aktivis digital.

Munculnya Gerakan Anti-Hegemoni

Hegemoni yang dibangun oleh pemerintah melalui sensor media di ruang digital memengaruhi secara signifikan kebebasan berpendapat dan akses informasi masyarakat. Ketika pemerintah melakukan sensor terhadap berbagai konten yang dianggap tidak sesuai dengan narasi dominan, dampaknya tidak hanya terbatas pada pengurangan ruang ekspresi individu, tetapi juga dapat memicu munculnya gerakan anti-hegemoni. Gerakan ini adalah bentuk perlawanan terhadap kontrol yang diberlakukan, dengan tujuan mempertahankan kebebasan berpendapat di ruang digital.

kelompok-kelompok yang merasa terpinggirkan atau dibatasi dalam menyuarakan pendapat mereka cenderung akan mengorganisir diri dalam gerakan anti-hegemoni. Gerakan ini bertujuan untuk melawan dominasi ideologi yang dipaksakan

oleh pemerintah melalui media yang terkendali. Dengan menggunakan media sosial dan platform digital lainnya sebagai saluran untuk menyuarakan ketidakpuasan, gerakan anti-hegemoni ini mencoba untuk membuka ruang bagi suara-suara alternatif yang dibungkam.

Munculnya gerakan kontra hegemoni merupakan konsekuensi logis dari praktik-praktik hegemoni salah satunya melalui media, Gramsci memberikan perspektif bahwa dalam upaya mencapai hegemoni akan muncul perlawanan dari kelompok subordinat yang disebut sebagai kontra-hegemoni atau upaya menciptakan wacana atau ideologi alternatif (Gramsci, 2013). Hal tersebut sebagaimana dilakukan oleh Social Movement Institute dengan memanfaatkan media sosial sebagai media alternatif dalam melawan narasi dari media mainstream

“Tidak semua orang harus mendengar pemerintah dari satu sisi saja, misal dari portal-portal berita mainstream justru suara pemerintah banyak dari situ, SMI sekarang jadi media alternatif di media sosial untuk memberikan counter narasi dari portal berita mainstream” (Wawancara kepada anggota Social Movement Institute, 23 Januari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan dampak dari upaya pemerintah dalam membangun hegemoni melalui sensor media telah memantik kelompok-kelompok subordinat untuk membentuk gerakan anti-hegemoni dengan melawan narasi-narasi yang disampaikan oleh pemerintah melalui portal berita mainstream. Hal senada juga disampaikan oleh anggota SMI yang menyatakan :

“sangat perlu adanya counter narasi biar masyarakat tidak dicekoki oleh berita-berita yang hanya diberitahu oleh pemerintah saja, pemerintah kan inginnya agar pemikiran dan budaya dari netizen itu condong ke pemerintah. Padahal tidak semua yang diberikan oleh pemerintah itu benar, misal kayak Menteri KKP kemarin yang bilang menghilangkan barang bukti kita harus menyampaikan counter narasi padahal tidak seperti itu, maka dari itu tugas kita sebagai masyarakat sipil harus memiliki counter narasi untuk penyeimbang kekuasaan agar demokrasi kita berjalan” (Wawancara Kepada anggota Social Movement Institute, 23 Januari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan SMI muncul sebagai salah satu organisasi anti hegemoni dengan berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat melalui berbagai konten-konten tandingan sebagai *counter* narasi yang disampaikan oleh pemerintah berkaitan dengan isu-isu yang sedang beredar di masyarakat.

Berkaca pada prespektif Ernesto Laclau & Chantal Mouffee (1985) yang lebih menggali persoalan hegemoni di negara sosialis seperti Uni Soviet sehingga memunculkan pendapat bahwa hegemoni muncul akibat ketidakmampuan kaum burjois Russia untuk melakukan perjuangan atau pengendalian secara normal untuk kebebasan politik sehingga membuat mereka memaksa kelas pekerja untuk terlibat guna mencapai tujuan kaum burjois tersebut.

Maka dari itu melihat kasus hegemoni yang terjadi diantara dua kelompok yang berbeda itu sehingga memunculkan istilah hegemoni ruang referensial atau dalam artian yang sederhana tidak memungkinkan terjadinya hegemoni sebagaimana yang dialami oleh kaum burjois dan kelas pekerja di Russia tanpa sesuatu atau sesuatu yang lain tidak akan mungkin yang mana sebagai *sine qua non* (Mouffee, 1985)

Pada aspek yang sama melalui analisis Laclau dan Mouffee *sine qua non* atau sesuatu yang tidak dapat dipisahkan menggambarkan elemen-

elemen yang sangat diperlukan agar dominasi atau hegemoni sebuah kelompok atau kekuasaan tetap terjaga. Dalam aspek sensor media di Indonesia praktik tersebut dilakukan guna mempertahankan pengaruh pemerintah terhadap masyarakat. Tanpa kontrol tersebut, pengaruh dan kekuasaan pemerintah dapat terganggu, dan potensi munculnya oposisi atau kritik yang lebih kuat bisa terjadi.

Pemerintah yang menguasai media atau mempengaruhi ruang digital menggunakan berbagai cara untuk mengatur narasi yang diterima oleh masyarakat. Hal ini sering kali melibatkan penyensoran terhadap informasi yang dianggap bertentangan dengan agenda mereka. Dengan demikian, pengendalian informasi dan narasi menjadi elemen yang tidak bisa dipisahkan dari struktur hegemoni mereka. Tanpa adanya sensor yang efektif, kelompok dominan dalam hal ini pemerintah tidak bisa mempertahankan pengaruh mereka secara maksimal.

Tekanan Dari Kelompok Dominan

Sensor media yang dilakukan oleh pemerintah dalam ruang digital menciptakan berbagai dampak terhadap kebebasan berpendapat dan pembentukan opini publik. Salah satu dampak besar dari sensor tersebut adalah munculnya tekanan dari kelompok dominan terhadap kelompok subordinat yang menjadi korban dari kebijakan tersebut.

Melalui kebijakan ini, kelompok dominan menciptakan sebuah struktur hegemoni yang membentuk bagaimana masyarakat menerima dan memahami dunia di sekitar mereka.

Sensor media tidak hanya terbatas pada penghapusan konten yang dianggap sensitif atau berpotensi merusak stabilitas politik, tetapi juga mencakup upaya untuk membentuk narasi yang sesuai dengan kepentingan kelompok dominan. Dalam konteks ini, sensor media berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan melalui pengendalian informasi, yang dalam teori Gramsci dikenal sebagai bagian dari mekanisme hegemoni. Dengan mengontrol narasi yang beredar di ruang digital, kelompok dominan dapat mengurangi resistensi dari kelompok subordinat yang mungkin menentang kebijakan atau ideologi yang mereka sebar.

Tekanan terhadap kelompok subordinat muncul karena mereka tidak memiliki akses yang sama terhadap ruang digital yang bebas dan terbuka. Dalam banyak kasus, kelompok subordinat termasuk kelompok oposisi atau masyarakat sipil harus menghadapi pembatasan dalam mengungkapkan pendapat mereka. Penyensoran terhadap konten yang kritis terhadap pemerintah atau penguasa dapat menghalangi suara-suara yang ingin menuntut keadilan atau perubahan sosial. Kondisi ini menciptakan ketimpangan dalam

kebebasan berpendapat di ruang digital, di mana hanya suara-suara yang sejalan dengan kekuasaan yang didorong untuk berkembang.

Hasil wawancara kepada anggota Social Movement Institute menunjukkan adanya pengerahan buzzer sebagai kelompok penekan sebagaimana disampaikan oleh anggota Social Movement Institute yang menyebutkan :

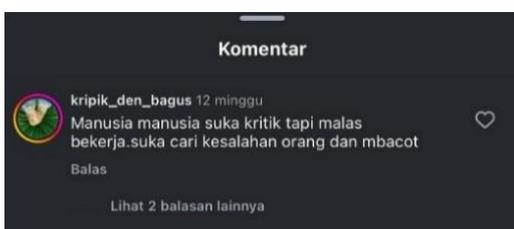
“Untuk SMI sebenarnya lebih ke ancaman pembobolan akun ada upaya login tapi kami sudah mempunyai SOP SOP keamanan digital sehingga bisa kami antisipasi, Tentu tekanan itu buzzer-buzzer, ya ancaman kita itu kan buzzer dan UU ITE” (Wawancara kepada anggota Social Movement Institute, 23 Januari 2025)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas menunjukkan adanya upaya-upaya pembobolan akun media sosial hingga tekanan-tekanan yang dilakukan para buzzer kepada SMI melalui DM (*Direct Message*) ataupun kolom komentar. Lebih lanjut hal serupa juga disampaikan oleh anggota Social Movement Institute yang menyatakan :

“Kolom komentar memang menjadi arena ring tinju orang dapat berantem, adu gagasan, yang tidak ada luarannya ke arah mana seperti apa yang dibahas di

konten sama apa yang dibahas di kolom komentar. SMI sebenarnya aware tentang kebijakan PSE Lingkup privat karena seharusnya kebijakan tersebut awalnya digunakan untuk memfilter mana postingan yang tidak baik untuk masyarakat, kebijakan tersebut rawan untuk disalahgunakan untuk menyerang masyarakat sipil” (Wawancara kepada anggota Social Movement Institute, 23 Januari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan, konten-konten edukasi ataupun perlawanan yang dibuat oleh Social Movement Institute seringkali mendapatkan tanggapan negatif dari akun-akun fiktif atau para buzzer yang memberikan tekanan terhadap upaya Social Movement Institute dalam melawan narasi pemerintah.



Gambar 3 Serangan Buzzer pada Kolom Komentar Konten Social Movement Institute

Munculnya tekanan dari kelompok dominan terhadap kelompok-kelompok anti hegemoni merupakan

sebuah konsekuensi logis akibat dari upaya pemerintah dalam mempertahankan kekuasaan dan hegemoninya. Sepanjang tahun 2022 saja kelompok aktivis dan organisasi sosial masyarakat menjadi kelompok kedua yang paling banyak mendapatkan serangan di dunia digital dengan 55 kasus hanya berbeda 8 kasus dari organisasi publik dengan 62 kasus sepanjang tahun 2022 (Banimal et al., 2023)

Fenomena munculnya buzzer sebagai kelompok penekan terhadap kelompok subordinat merupakan suatu fenomena yang lumrah dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia, peran buzzer seringkali dikaitkan dengan menggerakkan ataupun menggiring opini masyarakat melalui amplifikasi pesan di media sosial, tetapi pada umumnya amplifikasi pesan yang disampaikan oleh buzzer merupakan pesan-pesan kampanye hitam ataupun negatif dengan tujuan menjatuhkan pihak atau golongan tertentu (Khoerunnisa, 2024).

KESIMPULAN

Praktik sensor konten yang dilakukan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 mencerminkan upaya pengendalian ideologi dan pembatasan kebebasan berpendapat di ruang digital. Pemerintah memanfaatkan alasan perlindungan dan keamanan masyarakat untuk mewujudkan

kebijakan yang pada akhirnya justru menciptakan pasal-pasal yang fleksibel, berpotensi merugikan masyarakat sipil dalam melawan narasi dominan. Melalui kontrol terhadap narasi yang diizinkan untuk dipublikasikan, pemerintah membentuk hegemoni dengan mengatur akses informasi yang dapat diakses oleh publik, sekaligus membatasi konten.

Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia, melalui kebijakan sensor konten di media sosial, berusaha membentuk hegemoni ideologis yang menguntungkan kepentingan dominan mereka. Gramsci berpendapat bahwa hegemoni tidak hanya dicapai melalui kekuatan fisik, tetapi juga melalui kontrol ideologi dan konsensus, di mana negara berusaha mengendalikan cara pandang dan informasi yang diterima oleh masyarakat. Dalam konteks ini, kebijakan pemerintah yang mengatur sensor konten di media sosial dapat dilihat sebagai upaya untuk mendominasi ruang digital, membatasi informasi yang berseberangan dengan narasi yang diinginkan, dan memastikan bahwa hanya pandangan yang sejalan dengan kepentingan pemerintah yang diterima publik.

Social Movement Institute berperan sebagai kelompok yang melawan hegemoni ini, melakukan advokasi digital melalui pembuatan

infografis, riset, dan dialog publik untuk memberikan ruang bagi narasi alternatif. Munculnya kelompok anti-hegemoni, yang ditandai dengan peningkatan akun media sosial seperti Social Movement Institute, menunjukkan adanya perlawanan terhadap pembatasan kebebasan berpendapat di ruang digital. Kelompok ini berusaha menjaga agar proses demokrasi di Indonesia tetap berjalan dengan mengedepankan pluralisme informasi dan menjamin kebebasan berbicara di dunia maya.

Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia, melalui kebijakan sensor konten di media sosial, berusaha membentuk hegemoni ideologis yang menguntungkan kepentingan dominan mereka. Gramsci berpendapat bahwa hegemoni tidak hanya dicapai melalui kekuatan fisik, tetapi juga melalui kontrol ideologi dan konsensus, di mana negara berusaha mengendalikan cara pandang dan informasi yang diterima oleh masyarakat. Dalam konteks ini, kebijakan pemerintah yang mengatur sensor konten di media sosial dapat dilihat sebagai upaya untuk mendominasi ruang digital, membatasi informasi yang berseberangan dengan narasi yang diinginkan, dan memastikan bahwa hanya pandangan yang sejalan dengan kepentingan pemerintah yang diterima publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Andzani, D. &. (2023). Dinamika Komunikasi Global : Tren, Tantangan, dan Prospek Masa Depan. *Jurnal Syntax Administration*, 4(11), 1964-1976.
doi:10.46799/jsa.v4i11.743
- Angew, J. (2005). *Hegemony : The New Shape of Global Power*. Philadelphia: Temple University Press.
- Bakri, W. (2022). *Hegemoni Politik, Kekuasaan dan Media*. Parepare: AIN Parepare Nusantara Press.
- Banimal et al. (2023). *Digital Rights in Indonesia Situation Report 2022 The Collapse of Our Digital Rights*. Bali: Southeast Asia Freedom of Expression.
- Chomsky, N. (1997). *Media control: the spectacular achievements of propaganda*. New York: Seven Stories Press.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Garret, B. (2001). *The Right to Privacy : Individual Right and Civic Responsibility*. New York: The Rosen Publishing.
- Gramsci, A. (2013). *Catatan-Catatan dari Penjara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Institute, S. M. (2024, April 15). Kebebasan Yang Terancam. Retrieved from <https://www.instagram.com/p/C5yFbX9xaOV/?igsh=MXVoZjZiMWhjeGp5ZQ==>
- Institute, S. M. (2024, Juni 5). Perlahan Tapi Pasti Media Sosial Kita Makin Diawasi Negara. Retrieved from <https://www.instagram.com/p/C5yFbX9xaOV/?igsh=MXVoZjZiMWhjeGp5ZQ==>
- Judijanto et al. (2024). Efektivitas Kebijakan Perlindungan Data Pribadi dalam Menjaga Hak Asasi Manusia di Era Teknologi di Indonesia. *Sanskara Hukum dan HAM*, 3(1), 34-42.
- Khoerunnisa. (2024). Fenomena Buzzer dan Pengaruhnya dalam Proses Pesta Demokrasi di Indonesia Tahun 2024. *Jurnal Audiens*, 5(1), 91-100.
doi:10.18196/jas.v5i1.341
- Mirnayanti et al. (2023). Analisis Pengaturan Keamanan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Living Law*, 15(1), 16-30.
- Morozov, E. (2011). *The Net Delusion: The Dark Side of Internet Freedom*. New York: Public Affairs.
- Mouffee, E. L. (1985). *Hegemony & Socialist Strategy Towards a Radical Democratic Politic*. London: Verso.

- Nofiard, F. (2022). Komunikasi Politik Digital di Indonesia. *Al-Hiwar : Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah*, 10(2), 31-40. doi:10.18592/al-hiwar.v10i2.7548
- Safenet. (2024, Februari 26). Retrieved from X.com: <https://x.com/safenetvoice/status/1762013775358738851>
- Solove, D. J. (2011). *Nothing to Hide*. New Haven & London: Yale University Press.
- Turner, B. S. (2012). *Teori Sosial dari Klasik sampai Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Voice, S. (2021, Mei). [Position Paper] *Analysis of Indonesia MR5/2020 concerning Private Electronic System Operators*. Retrieved from Safenet: <https://safenet.or.id/2021/05/position-paper-analysis-of-the-minister-of-communication-and-informatics-regulation-no-5-of-2020-mr5-2020-concerning-private-electronic-system-operators/>
- Wada et al. (2024). *Buku Ajar Metodologi Penelitian*. Jambi: Sonpedia Publishing.
- Westin, A. (1967). *Privacy and Freedom*. Portsmouth: International Association of Privacy Professionals.
- Wiryawan, R. A. (2023). Hak Warga Masyarakat terhadap Kebijakan Pemutusan Akses Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat yang Tidak Terdaftar. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(4), 681-704. doi:10.21143/jhp.vol53.no4.1533